

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen), di mana *agent* diberi wewenang oleh *principal* untuk menjalankan aktivitas dan mengambil keputusan atas nama *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan ini, terdapat potensi asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham sehingga menyulitkan proses pengawasan (Healy & Palepu, 2001). Ketidakseimbangan informasi tersebut disertai dengan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga menimbulkan konflik keagenan, di mana *agent* cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent*.

Dalam konteks *environmental disclosure*, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan mekanisme yang mampu meningkatkan transparansi informasi sebagai upaya mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah perlunya penerapan mekanisme pengawasan dan karakteristik manajemen yang efektif untuk meminimalkan konflik antara *principal* dan *agent*. Dewan komisaris berperan sebagai pengawas manajemen sehingga dapat mendorong peningkatan pengungkapan guna mengurangi asimetri informasi. Selain itu, karakteristik direksi

sebagai *agent* juga dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan tingkat transparansi perusahaan, salah satunya melalui keberagaman gender direksi. Dengan demikian, mekanisme pengawasan dan karakteristik dewan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan *environmental disclosure* sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

2.2. Teori Feminisme

Teori feminisme merupakan suatu pemahaman mengenai keadilan berbasis gender yang dapat dijadikan landasan dalam pemikiran, gerakan, maupun kebijakan (Melati, 2019). Teori ini menjelaskan bahwa perempuan cenderung memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap nilai sosial, etika, dan kepedulian lingkungan (Fotaki & Pullen, 2024). Selain itu, perempuan lebih menghargai kebutuhan orang lain, bersikap kooperatif, serta memiliki kedekatan emosional yang lebih tinggi, sedangkan laki-laki cenderung lebih berorientasi pada kepentingan individu, persaingan, dan dominasi (Lasthuizen & Badar, 2023).

Teori feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *United Nations* melalui *Sustainable Development Goals*, Goal ke 5 (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>).

Dalam perusahaan, kesetaraan gender dapat diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam posisi strategis seperti dewan direksi. Kehadiran perempuan memberikan perspektif yang lebih peka terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab.

Hal ini berpotensi meningkatkan perhatian perusahaan terhadap aspek lingkungan dan mendorong pengungkapan lingkungan yang lebih luas.

2.3. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan (Chariri & Ghozali, 2014). Legitimasi dipahami sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu perusahaan telah sesuai dengan norma, nilai, dan keyakinan yang berlaku dalam sistem sosial (Suchman, 1995). Ketidaksesuaian antara nilai perusahaan dan ekspektasi masyarakat dapat menimbulkan *legitimacy gap* yang berisiko mengganggu keberlangsungan perusahaan Dowling & Pfeffer (1975). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan operasionalnya sejalan dengan harapan masyarakat agar tetap memperoleh dukungan, salah satunya melalui *environmental disclosure* sebagai bentuk transparansi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan

Environmental disclosure menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan tanggung jawab lingkungannya kepada publik serta membangun dan mempertahankan legitimasi. Melalui pengungkapan ini perusahaan berupaya menunjukkan bahwa kinerja lingkungannya telah sejalan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku, sekaligus mencerminkan upaya dalam mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, *environmental disclosure* berperan penting dalam memperkuat kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan.

2.4. Pengungkapan

Kata *disclosure* (pengungkapan) dapat dipahami sebagai tindakan tidak menutupi atau tidak menyembunyikan informasi (Chariri & Ghazali, 2014). Sejalan dengan itu, *Financial Accounting Standards Board* dalam kerangka konseptualnya menyatakan bahwa penyajian informasi perusahaan tidak terbatas pada laporan keuangan utama, tetapi juga mencakup informasi lain yang lebih efektif disampaikan melalui bentuk pelaporan tambahan (FASB, 1978). Menurut Tuanakotta (1986), terdapat tiga konsep pengungkapan, yaitu *adequate disclosure* (pengungkapan cukup), *fair disclosure* (pengungkapan layak), dan *full disclosure* (pengungkapan penuh). *Adequate disclosure* mengacu pada pengungkapan minimum yang diperlukan agar laporan tidak menyesatkan. Sementara itu, *fair disclosure* menekankan pada penyampaian informasi secara adil dan tidak bias, sedangkan *full disclosure* mengacu pada penyajian seluruh informasi yang relevan secara lengkap.

Informasi yang diungkapkan harus lengkap, jelas, dan akurat agar dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan oleh pengguna laporan. Semakin lengkap dan luas informasi yang diungkapkan perusahaan (*full disclosure*), maka asimetri informasi antara perusahaan dan pengguna laporan dapat semakin berkurang (Fitriana et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, pengungkapan menjadi dasar dalam memahami bagaimana perusahaan menyampaikan informasi nonkeuangan, khususnya terkait aspek lingkungan melalui *environmental disclosure*.

2.5. *Environmental Disclosure*

Perusahaan menghadapi tekanan dari pemerintah, investor, masyarakat, dan pemerhati lingkungan akibat meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Untuk merespons hal tersebut dan mencapai keberlanjutan, perusahaan dapat melakukan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan (Tuanakotta, 1986). Pengungkapan lingkungan adalah pengungkapan informasi mengenai aktivitas dan dampak perusahaan terhadap lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan (Chariri & Ghozali, 2014).

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, POJK No. 51/POJK.03/2017 mengatur kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yang penerapannya dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengungkapan lingkungan menjadi salah satu bentuk implementasi tanggung jawab perusahaan sekaligus sarana untuk mengurangi asimetri informasi serta memperoleh dan mempertahankan legitimasi atas aktivitas operasional perusahaan.

2.6. *Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) merupakan serangkaian prosedur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan suatu organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rankin et al., 2018). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Implementasi *corporate governance* erat kaitannya dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara manajemen sebagai *agent* dan pemilik sebagai *principal* (Sudarmanto et al., 2021). Dalam hubungan tersebut, tata kelola yang baik diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Penerapan *corporate governance* juga dapat mendorong peningkatan kualitas pengungkapan informasi, termasuk dalam aspek lingkungan (*environmental disclosure*) (Ifada, 2022). Dalam penelitian ini, komponen tata kelola perusahaan yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris dan keberagaman gender direksi.

2.7. **Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan, baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 juga menjelaskan bahwa peran ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan agar tetap sesuai dengan

maksud serta tujuan perusahaan, dengan jumlah anggota paling sedikit satu orang atau lebih. Selain itu, dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik, sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya secara transparan dan memenuhi kewajiban pengungkapan informasi yang relevan (Sudarmanto et al., 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nicolo et al. (2023) yang menyatakan jumlah dewan komisaris yang lebih besar dapat memperkuat pengendalian internal sehingga mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal melalui pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*).

2.8. Keberagaman Gender Dewan Direksi

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 menjelaskan bahwa direksi merupakan organ penting dalam perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tugas ini memerlukan komposisi dewan yang profesional, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan secara tepat dan independen (Sudarmanto et al., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, keberagaman gender dalam dewan direksi menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan.

Keberagaman gender dewan merujuk pada perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki dalam struktur dewan (Gustafsson & Jönsson, 2025). Kehadiran perempuan dalam dewan direksi dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui ide, pengalaman, dan cara pandang yang

berbeda (Ifada, 2022). Hal ini sejalan dengan teori feminisme yang menekankan bahwa perempuan cenderung lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mampu mengevaluasi strategi lingkungan secara lebih efektif serta mendorong penerapan praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (Fotaki & Pullen, 2024).

2.9. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan bentuk kinerja perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola dampak negatif aktivitas bisnis (Ifada, 2022). Sementara itu, Hapsari et al. (2024) menyatakan kinerja lingkungan juga menunjukkan sejauh mana perusahaan berupaya memelihara dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, pengukuran kinerja lingkungan perusahaan dapat dilakukan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diatur dalam Permen LHK No. 1 Tahun 2021.

PROPER bertujuan mendorong perusahaan menaati peraturan lingkungan sekaligus menilai kinerja pengelolaan lingkungan secara transparan kepada publik. Berdasarkan Pasal 33 Permen LHK No. 1 Tahun 2021, penilaian PROPER dikategorikan ke dalam lima peringkat warna, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kinerja perusahaan, di mana peringkat emas menunjukkan kinerja terbaik dan hitam menunjukkan kinerja terendah. Aspek yang dinilai meliputi pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, pemeliharaan sumber air, pengendalian kerusakan lahan, pengelolaan

sampah, serta kepatuhan terhadap dokumen dan sistem manajemen lingkungan perusahaan. Dengan cakupan tersebut, PROPER menjadi indikator yang representatif dalam menilai kinerja lingkungan sekaligus mendorong perusahaan meningkatkan kinerja dan menjaga reputasi.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *environmental disclosure* telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan beragam variabel dan periode penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) dan Nicolo et al. (2023) memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh kepada *environmental disclosure*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Saputro et al. (2026) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada *environmental disclosure*. Adapun penelitian oleh Buallay & Alhalwachi (2022) menyimpulkan bahwa *female boards member* berpengaruh positif pada *environmental disclosure*, sedangkan hasil penelitian Aly et al. (2024) menyebutkan bahwa *board diversity gender* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Selanjutnya, penelitian oleh Hapsari et al. (2024), Arbin & Rohmatika (2024), dan Cahyaningsih et al. (2022) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan hasil penelitian Suryarahman & Trihatmoko (2021) dan Ardillah (2022) menyebutkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	(Nicolo et al., 2023)	Variabel Dependen: <i>Environmental, Social, and Governance</i> Variabel Independen: Ukuran Dewan Perusahaan, Independensi Dewan, Keragaman Gender Dewan, CEO Duality, Keberadaan Komite CSR	Perusahaan sektor utilitas yang terdaftar secara publik di seluruh dunia	1. Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental, Social, and Governance</i> 2. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental, Social, and Governance</i> 3. Keberagaman gender berpengaruh positif terhadap <i>Governance Disclosure</i> , namun tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i> 4. CEO Duality tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental, Social, and Governance</i> 5. Komite CSR/Sustainability berpengaruh positif terhadap <i>Environmental, Social, and Governance</i>
2.	(Wahyuningrum & Amalia, 2023)	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i>	Perusahaan sektor energi di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i>

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
		Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Perusahaan, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial	Singapura tahun 2019	2. Ukuran Dewan Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i> 3. Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i> 4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i> 5. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
3.	(Saputro et al., 2026)	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan, <i>Gender Diversity</i>	Perusahaan sektor bahan baku periode 2019-2023 di Bursa Efek Indonesia	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 2. Ukuran Dewan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 3. <i>Gender Diversity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i>
4.	(Buallay & Alhalwachi, 2022)	Variabel Dependen:	<i>Gulf Cooperation Council</i>	1. Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
		<i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Ukuran Dewan, Profitabilitas, Independensi Dewan, CEO Duality, Keberagaman Gender Dewan, Karakteristik Komite Audit	(CGC) Countries 2007-2017	<i>environmental disclosure</i> 2. Independensi Dewan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 3. CEO Duality tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 4. Keberagaman Gender Dewan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 5. Karakteristik Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>
5.	(Aly et al., 2024)	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Ukuran Dewan, Independensi Dewan, CEO Duality, Rapat Deewan, Keberagaman Gender	Perusahaan FTSE dan 200 S&P 2010 - 2020	1. Ukuran Dewan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 2. Independensi Dewan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 3. CEO Duality tidak berpengaruh terhadap

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
		Dewan, Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit		<i>environmental disclosure</i> 4. Rapat Dewan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 5. Keberagaman Gender Dewan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 6. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 7. Independensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i>
6.	(Hapsari et al., 2024)	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, <i>Environmental Performance</i> , Profitabilitas	Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2022	1. Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 3. <i>Environmental Performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
				4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>
7.	(Arbin & Rohmatika, 2024)	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: <i>Environmental Performance</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2023	1. <i>Environmental Performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>
8.	(Suryarahman & Trihatmoko, 2021)	Variabel Dependen: Pengungkapan Lingkungan Variabel Independen: Kinerja Lingkungan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018	1. Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan 4. Rapat dewan komisaris

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan
9.	(Cahyaningsih et al., 2022)	Variabel Dependen: <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas	Perusahaan sektor energi, barang mentah, dan barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021	1. Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i> 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i> 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
10.	(Ardillah, 2022)	Variabel Dependen: <i>Corporate Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: <i>Environmental Performance, Feminism in Commissioner, Female Audit Committee, Corporate Visibility</i>	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019	1. Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 2. <i>Feminism in Commissioner</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan 3. <i>Female Audit Committee</i> , berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
				4. <i>Corporate Visibility</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure*

Dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang berperan penting dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen (Sudarmanto et al., 2021). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memonitor tindakan manajemen guna meminimalkan konflik antara *principal* dan *agent*. Dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar memiliki potensi pengawasan yang lebih efektif dan beragam pandangan yang dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi lingkungan secara luas.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) dan Nicolo et al. (2023) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempengaruhi *environmental disclosure* secara positif. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Saputro et al. (2026) dan Aly et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut :

H_{A1}: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

2.11.2. Pengaruh Keberagaman Gender Dewan Direksi Terhadap *Environmental Disclosure*.

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 menjelaskan bahwa direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, keberagaman gender dalam direksi menjadi penting karena kehadiran perempuan membawa perspektif, nilai, dan pengalaman yang berbeda sehingga mendorong perhatian lebih besar terhadap aspek keberlanjutan dan pengungkapan informasi lingkungan (Lewa et al., 2024). Hal ini sejalan dengan teori feminisme yang menjelaskan bahwa perempuan cenderung memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap nilai sosial, etika, dan kepedulian lingkungan (Fotaki & Pullen, 2024). Sejalan dengan itu, teori agensi juga menekankan bahwa karakteristik manajemen sebagai *agent*, termasuk keberagaman gender dalam direksi, dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan transparansi perusahaan (Hindasah & Harsono, 2021).

Penelitian terdahulu oleh Buallay & Alhalwachi (2022) menyatakan bahwa kehadiran anggota perempuan dalam dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, karena peran perempuan dalam mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan bertanggung jawab secara

lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Aly et al., 2024) menyatakan bahwa *board diversity gender* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka dalam penelitian ini, digunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut :

H_{A2}: Keberagaman gender direksi berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

2.11.3. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap *Environmental Disclosure*

Kinerja lingkungan mencerminkan sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (Ifada, 2022). Menurut teori legitimasi, perusahaan berupaya memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat agar memperoleh dukungan dan kepercayaan publik (Suchman, 1995). Dalam konteks ini, kinerja lingkungan menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan baik cenderung berusaha mempertahankan legitimasi dengan mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (Hapsari et al., 2024).

Dengan demikian, semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan, semakin besar juga dorongan untuk mengungkapkan informasi lingkungan secara lebih luas dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Teori ini diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Hapsari et al. (2024) dan Arbin & Rohmatika (2024) yang

menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan penelitian oleh Suryarahman & Trihatmoko (2021) dan Ardillah (2022) menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut :

H_{A3}: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

